

MANAJEMEN, POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Siti Rahayu NM

sitirahayunm@gmail.com

***Abstract:** This paper presents a condition in which management, politics and policies in Islamic religious education. The trio is a unity that can not be separated from one another. Because they relate it takes good management, from planning, organizing, directing, monitoring and evaluation. In terms of education policy have a different phase when in the hands of a different leader, demonstrating the close relationship between political dominance in shaping policy in the implementation of the policy, especially education, especially Islamic education.*

***Keywords:** Management, Politics, Policy, Islamic Religious Education*

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan kegiatan dakwah Islam. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dimana ajaran Islam dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya.¹ Pendidikan Islam di Indonesia paling tidak telah mengambil bentuknya tersendiri pada tiga macam. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga dengan diakuinya pendidikan Islam oleh pemerintah. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dengan diberlakukannya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai dengan ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.²

Tiga bentuk pendidikan Islam tersebut tidak terbentuk saja. Ia mengalami berbagai dialektika dengan serentetan kebijakan politik pendidikan di Indonesia. Begitu Islam masuk ke Indonesia, ia secara langsung atau tidak telah bersentuhan dengan kebijakan pemerintah atau penguasa Indonesia. Kebijakan tersebut sedikit atau banyak telah mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap Negara.³

¹ Abudin Nata. *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 1

² Abudin Nata. *Manajemen*, hlm. 4

³ M. Sirozi. *Politik Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo.2005), hlm. 1

Pendidikan agama islam memiliki korelasi yang sangat erat dengan manajemen, politik dan kebijakan. Ketiga hal tersebut saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, dan akan mengalami kepincangan jika satu dari ketiganya tidak berjalan. Oleh sebab itu, pendidikan kita tidak mengabaikan harus berupaya menyeimbangkan hubungan dari ketiganya tersebut.

PEMBAHASAN

1. Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa inggris dari kata kerja "to hand" berarti mengurus, "to control" berarti memeriksa, "to guide" berarti memimpin. Jadi apabila hanya dilihat dari asal katanya manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.⁴ Dalam manajemen mengandung dua makna, ialah *Mind* (pikir) dan *Action* (tindakan), secara terminologis, manajemen berarti :

- a. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencari tujuan
- b. Segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang untuk mengerahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan.
- c. Bekerja dengan menggunakan atau meminjam tangan orang lain.⁵

Tiga pengertian ini memberikan isyarat adanya dua jenis pekerjaan, pekerjaan manajerial di satu pihak dan pekerjaan yang proses penyelesaiannya menggunakan tangan orang lain, menggunakan tangan sendiri. George Terry menyatakan bahwa definisi manajemen adalah suatu tindakan perbuatan seseorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, sedangkan tanggung jawab tetap di tangan yang memerintah. Menurut Koonzt C.O. Donnell manajemen adalah usaha pertambahan fungsi-fungsi kegiatan untuk mencapai tujuan. Dari ketiga pengertian tersebut mengenai masalah tanggung jawab, pembagian kerja, efisiensi. dikehendaki oleh sarjana yang mengemukakanya sesuai dengan pengertian yang

⁴ Ek. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: (PT Bhratara Karya Aksara), hlm 9

⁵ Imron, dkk. *Manajemen Pendidikan Analisis dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003) hlm. 4

terdapat ajaran islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Zalzalah:7-8 yang berbunyi;

﴿۷﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۸﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.⁶

Manajemen didefinisikan oleh Nanang Fattah bahwa manajemen sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dan segala aspeknya agar tujuan organisasi dan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.⁷ Sebagaimana Firman Allah QS.As-Sajdah ayat 5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا

تَعُدُّونَ ﴿۵﴾

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.⁸

Q.S As-Shaff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ﴿۴﴾

Artinya; Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.⁹

Manajemen merupakan seni mengatur atau mengelola seseorang dalam suatu organisasi atau lembaga. Untuk mengatur atau mengelola dibutuhkan tahapan sehingga tujuan manajemen disini terlihat secara sistematis. Adapun tujuan manajemen ada tiga yakni sebagai motivasi, sebagai peningkatan produktivitas dan

⁶ Al-qur'an Al-karim dan terjemah Bahasa Indonesia jus 30 (Semarang: Menara Kudus, 2006), hlm. 599

⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet VII,2004) hlm 1

⁸ Alqur'an Al- Karim dan Terjemah...,hlm 473

⁹ Alqur'an Al- Karim dan Terjemah...,hlm. 654

sebagai kepuasan pengguna. Manajemen sebagai motivasi disini dimaknai bahwa seorang manajer (pemimpin) hendaknya bisa memberikan sebuah semangat, harapan, cita-cita pada karyawannya agar memiliki loyalitas dan keinginan kuat untuk memajukan lembaga dimana dia bekerja.

Manajemen sebagai peningkatan produktivitas, setiap orang memiliki kemampuan dan keahlian masing-masing. Kemampuan dan keahlian itu perlu dimaksimalkan dan diberikan ruang untuk beraktualisasi sehingga lembaga terbantu dengan keberadaan mereka, selain itu karyawan juga diberikan sebuah pelatihan untuk peningkatan kapasitasnya sehingga kemampuan dalam kinerjanya akan meningkat sesuai dengan tujuan lembaga tersebut. Manajemen sebagai kepuasan pengguna, dimaksudkan profil lulusan dari lembaga pendidikan ini bisa memenuhi dari kebutuhan pengguna. Pengguna disini bisa masyarakat, dunia kerja dan lain sebagainya.

Menejer (pimpinan) harus memahami fungsi pokok menejemen yang terdiri dari; Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*) dan Evaluasi (*evaluating*). Fungsi ini merupakan tahapan seorang pimpinan dalam memulai mengelola sebuah lembaga.¹⁰ Perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan pimpinan untuk menyusun program kerja yang akan dilakukan dalam satu periode kepemimpinannya. Pengorganisasian merupakan proses yang dilakukan pimpinan dalam mengatur karyawan dengan menentukan kerja masing-masing karyawan sesuai dengan keahliannya. Pengarahan disini dimaknai sebagai pemberian motivasi dan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Pengawasan dilakukan untuk mengawal kerja karyawan agar sesuai dengan perencanaan yang dibuat diawal. Evaluasi merupakan tahap akhir untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan yang dibuat oleh pimpinan sudah berhasil atau belum. Ketika hasilnya jauh dari harapan pimpinan, maka perlu direkomendasi untuk perubahan perencanaan dan strategi yang baru.

¹⁰ Nanang Fattah. *Landasan Manajemen...*, hlm 1

2. Politik Pendidikan

Kata Politik berasal dari bahasa Inggris, *Politics* yang berarti permainan politik.¹¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tatacara pemerintahan dan sebagainya, dan dapat berarti pula segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya, mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.¹² Dalam bahasa Arab kata politik dikenal dengan istilah *siyasah* yang berarti cipta, upaya-upaya strategis dan pengaturan tentang sesuatu.¹³

Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awal pen- dan akhiran -an, dan berarti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya mendidik, pengetahuan tentang mendidik, pengetahuan tentang mendidik, dan berarti pula pemeliharaan, latihan-latihan dan sebagainya yang meliputi badan, batin, dan sebagainya.¹⁴ Kata pendidikan dalam bahasa Yunani, dikenal dengan *paedagogos* yang berarti menuntun anak. Dalam bahasa Arab kata pendidikan diwakili oleh beberapa kata *tarbiyah*, *ta'dib*, *ta'lim*, *tadris*, *tadzkiyah*, dan *tadzkirah* yang secara keseluruhan menghimpun kegiatan yang terdapat dalam pendidikan yaitu membina, memelihara, mengajarkan, menyucikan jiwa dan mengingatkan manusia terhadap hal-hal yang baik.¹⁵

Politik pendidikan adalah segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Dalam perkembangan sejarahnya politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan pemikiran dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai kesamaan yang beraneka ragam beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Nata¹⁷ politik pendidikan mengandung lima hal sebagai berikut:

¹¹John M. Echols Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. (Jakarta : Gramedia, 1980), cet. VIII, hlm 437

¹²W.J.S. Poerdarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet. VII, hlm 763

¹³Jamil Saliba. *Mu'jam al-falsafi*. (Mesir: dar al-fikr, 1978) cet. VII, hlm. 45

¹⁴W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum*. hlm 250

¹⁵Abudin Nata. *Manajemen*., hlm 9

¹⁶Abudin Nata. *Manajemen*., hlm 9

¹⁷Abudin Nata. *Manajemen*., hlm. 9-11

- a. Politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara. Sebuah pemerintah Negara dalam berkomunikasi dengan rakyatnya biasanya menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh abdi Negara dan masyarakat sesuai dengan bidangnya termasuk pendidikan.
- b. Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan lainnya. Misalnya situasi dan kondisi sosial politik, budaya, keamanan dan hubungan pemerintah dengan dunia internasional. Meskipun kondisi tersebut tidak berkaitan secara langsung akan tetapi cukup berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan suatu Negara.
- c. Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan karena pemerintah memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang lebih kuat dalam memikul tugas dan tanggung jawab terselenggaranya pendidikan, walaupun swasta juga ikut berperan di dalamnya.
- d. Politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan Negara
- e. Politik pendidikan merupakan sebuah system penyelenggaraan pendidikan suatu Negara.

3. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan suatu kearifan yang dimiliki oleh seorang pemimpin kepada bawahan atau masyarakatnya. Pemimpin yang arif dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi.¹⁸ Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kebijakan ketika digunakan dalam dunia pendidikan memiliki arti sebagai upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan

¹⁸ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara.2002)hlm 15

dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa.¹⁹ Tujuan dari kebijakana bukan hanya membantu membuat sebuah keputusan yang efisien, tetapi juga menyumbang perbaikan praktek demokrasi yang ada dalam organisasi atau lembaga. Yang mana pada gilirannya akan membantu dalam merealisasikan sepenuhnya harga diri manusia.²⁰ Dari kebijakan yang dibuat ini akan menjadi sebuah alat untuk meningkatkan kemajuan sekaligus komitmen dari karyawan untuk mengembangkan organisasi atau lembaga.

Kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin dalam rangkah untuk merealisasikan kebutuhan manusia dan orang lain pengguna kebijakan tersebut. Adapun langkah dalam merealisasikan kebijakan antara lain dengan;

- a. Kekuasaan (*power*) yaitu keikutsertaan dalam pengambilan keputusan
- b. Pencerahan dari kebodohan (*enlightenment*) yaitu pemahaman, pengetahuan informasi,
- c. Kekayaan (*wealth*) yaitu penghasilan dan hak milik
- d. Kesejahteraan (*well-being*) yaitu kesehatan, rasa aman, kenyamanan dan keselamatan
- e. Keterampilan (*skill*) yaitu kemahiran dalam melaksanakan tugas
- f. Perasaan kasih sayang (*affection*) yaitu cinta, persahabatan, kesetiaan dan solidaritas
- g. Penghargaan (*respect*) yaitu kehormatan, status, reputasi dan nondiskrimasi
- h. Kejujuran (*rectitude*) yaitu kecocokan dengan standar etik dan keagamaan.

Kebijakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan program. Kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Cara memandang masalah kebijakan bersifat komprehensif, artinya bagian-bagian dilihat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu dengan yang lain saling mempengaruhi.

¹⁹Ali Imron, *Kebijaksanaan..*, hlm 15

²⁰W.N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*. (New York: Prentice-Hall, 1981).

4. Manajemen, politik dan Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia

a. Kebijakan Potitik Pendidikan Islam Pemerintahan Indonesia

Kebijakan politik pemerintahan di Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam empat periode:

1) Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Pra-kemerdekaan

Kebijakan politik pemerintahan Indonesia berada di tangan Belanda. Pada masa itu Belanda menerapkan politik deskriminatif terhadap rakyat jajahannya terutama terhadap umat Islam, yaitu pelit memberikan pendidikan. Belanda sengaja membiarkan rakyat jajahannya berada dalam kebodohnya, sehingga mudah dijajah. Hal itu berubah setelah Belanda mendapat tekanan dari dunia Internasional, Belanda memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Namun, tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pemerintahan Belanda, pada tahap selanjutnya dapat memperkokoh Belanda.²¹

Belanda sangat mencurigai dan tidak suka pada keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di Pesantren, Madrasah, karena dianggap pemberontak. Dalam keadaan demikian, maka politik yakni tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan mengusir Belanda dengan mendorong para pelajar untuk berjuang melawan Belanda. Sejalan dengan itu, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan sekolah sebagaimana dengan Belanda. Kegiatan ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nadhdatul Ulama, Persatuan Islam dan sebagainya. Di lembaga-lembaga Islam tersebut selain diberikan ilmu agama juga diberikan pengetahuan umum, rasa cinta tanah air.

Dengan demikian politik pendidikan Islam yang dilakukan pada masa pra kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh politik dan kebijakan pemerintahan pada masa itu, yakni pemerintah kolonialis Belanda. Politik pendidikan Islam yang diterapkan tokoh-tokoh pendidik pada masa itu, selain menyadarkan umat Islam tentang perlunya melakukan pembaharuan

²¹Abudin Nata. *Manajemen*., hlm 11

pendidikan Islam, juga ternyata berjasa dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang berjiwa nasionalis, patriotis, dan kepribadian Indonesia.²²

2) Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama

Pada masa ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya memperbaharui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan. Namun keinginan ini belum terlaksana sepenuhnya, karena Indonesia baru saja merdeka. Kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut serta mempengaruhi politik pendidikan Islam pada itu.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan ketetapan MPRS II/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana. Pada tahapan pertama tahun 1961-1969. Ketetapan yang berkaitan dengan pendidikan nasional menyebutkan bahwa pada pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Rakyat (SR) sampai dengan Universitas, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/ murid menyatakan keberatan.²³

Pada Pemerintah Orde Lama terdapat tiga kekuatan, yaitu nasionalis, sekularis komunis, dan Islamis. Ke tiga kekuatan ini seringkali benturan dan saling mengalahkan. Menjelang ahir 60-an Soekarno terjebak ke dalam perangkap kaum sekuler-komunis. Soekarno dituduh berada di belakang G30 S-PKI. Dalam keadaan demikian perhatian Soekarno terhadap pendidikan Islam amat kurang, bahkan umat Islam terpinggirkan, dan banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang dipenjarakan. Dengan demikian politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya membendung paham komunis.

3) Kebijakan politik pemerintah pada masa Orde Baru

Dimulai dari tahun 1966, masyarakatnya memiliki karakter sebagai berikut:

a) Lemah jika berhadapan dengan kekuasaan pemerintah

²²Abudin Nata. *Manajemen*, hlm. 12

²³Ali Hasan. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. (Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya. 2003), hlm. 52

- b) Tidak mampu mengakulturasikan dirinya ke dalam kekuatan politik, ekonomi, hukum, sehingga terlibat bersama-sama
- c) Mengalami fragmentasi baik kultural maupun struktural

Dari uraian di atas, terlihat fenomena terjadinya perbedaan yang mencolok antar kebijakan politik pemerintah bersifat refresifdominatif. Kebijakan politik pemerintah yang berupa peraturan perundangan selama masa Orde Baru bukanya meningkatkan, akan tetapi sebaliknya mengkerdilkan aktivitas politik masyarakat, sehingga menjadi tidak berdaya sama sekali.²⁴

Berdasarkan pada konsep politik yang diterapkan itu, maka politik pendidikan pada pemerintahan Orde Baru mengacu kepada Garis-garis Haluan mulai diberlakukan sejak 1973-1988. Sedangkan awal Orde baru berdasarkan ketetapan MPRS/ No. XXVII/MPRS/1966 yang secara umum tujuan pendidikan pada masa Orde Baru adalah untuk membentuk manusia yang berjiwa pancasila, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.²⁵ Permasalahan yang dihadapi Orde dalam bidang pendidikan diantaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, afektifitas dan efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Keempat masalah ini oleh pemerintah Orde Baru ditangani dan diselesaikan dengan berbagai upaya yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pendidikan.

Kebijakan tersebut adalah:

- a) Melanjutkan program pemberantasan buta huruf, kemudian pada tahun 1972 dikembangkan memberikan keterampilan tertentu.
- b) Melaksanakan pendidikan agar masyarakat memiliki kemampuan mental, spiritual.
- c) Mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya.
- d) Mengenalkan inovasi pendidikan, misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- e) Pembinaan generasi muda melalui Organisasi Intra Sekolah

²⁴ Ali Hasan. *Kapita Selekta...*, hlm 17

²⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 81-82

f) Dilaksanakannya program orang tua asuh mulai 1984

Ketetapan yang dikeluarkan terkait pendidikan islam pemerintah memberi status bahwa pendidikan agama Islam menjadi mata pelajaran wajib yang harus diikuti semua siswa dan mahasiswa serta menjadi syarat kelulusan ujian ahir. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada ketetapan MPRS No. XXVII/1966. Dan pada berikutnya tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah Madrasah dalam semua tingkat dari tingkat ibtdaiyah sampai Aliyah.²⁶ Upaya-upaya di atas merupakan kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru yang dicanangkan secara Nasional. Alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sangat minim dalam bidang pendidikan menjadikan pendidikan sebagai sektor yang lemah dan terasa sulit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.²⁷

Pada sekitar tahun 1970-an baru mulai adanya perhatian pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan madrasah, misalnya dengan lahirnya SKB 3 Menteri tahun 1975 antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, yang disusul dengan SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Sejak saat itu madrasah memasuki mainstream pendidikan nasional.²⁸

Sehubungan dengan hal di atas pemerintah Orde Baru menggiring politik pendidikannya pada sistem sentralistik.²⁹ Jadi politik pendidikan Orde Baru tidak jauh berbeda dengan kebijakan politiknya. Bila kebijakan di bidang politik ini sangat melemahkan umat Islam, dengan demikian bahwa kebijakan politik suatu Negara sangat mempengaruhi politik pendidikannya.³⁰ Meskipun secara politik kurang memberikan tempat pada pengembangan agama, akan tetapi pada Orde Baru ini sangat

²⁶ Ali Hasan. *Kapita Selekta...*, hlm 53

²⁷ Abudin Nata. *Manajemen.*, hlm 18

²⁸ Abudin Nata. *Manajemen.*, hlm. 155

²⁹ Mashutu. *Pendidikan Indoneia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru*” dalam Gema Jurnal Pendidikan, Edisi 1 Agustus, 1999, hlm 17-18

³⁰ Abudin Nata. *Manajemen.*, hlm 18

mempertimbangkan pentingnya agama sebagai kekuatan moral dan spiritual.³¹

4) Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Reformasi

Pemerintahan reformasi ini ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Namun berbagai kebijakan yang ada di Orde Baru baru belum seluruhnya dihapus. Sentralisasi pendidikan seperti dalam hal kurikulum, ujian, akreditasi, anggaran dan berbagai aturan belum jauh berbeda dengan masa Orde Baru. Berbagai kondisi perpolitikan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, tampak bahwa pendidikan Islam dalam perjalanannya mengalami hambatan, tantangan, dan harapan. Sepanjang Sejarahnya pendidikan Islam mengawal dan mengiringi perjalanan pendidikan nasional. Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. UU tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.³²

b. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sejak kedatangannya ke Indonesia, para penyiar Islam awal di Indonesia telah menggunakan media dakwah dan pendidikan sebagai sarana penyebarannya. Dalam proses sosialisasi mengenai Islam melalui pendidikan tersebut, selain dilakukan oleh masyarakat, juga dilakukan oleh pemerintah. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu akhirnya terjadi saling mempengaruhi. Di satu sisi, pemerintah dipengaruhi oleh corak dari lulusan pendidikan tersebut dan disisi yang lain, pemerintah juga mempengaruhi. Corak pendidikan, arah dan tujuannya selanjutnya ditentukan oleh pemerintah. Dalam kaitan dengan ini maka muncullah apa yang dimaksud dengan politik pendidikan.³³

Sistem politik yang berlaku dalam suatu Negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat Negara termasuk kebijakan

³¹ Ali Hasan. *Kapita Selekta...*, hlm 53

³² Hasbullah, *Sejarah Pendidikan* ., hlm. 81-82

³³ Abuddin Nata, *Manajemen.*, hlm. 7

pendidikannya.³⁴Politik pendidikan yang diterapkan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan akan selalu berdasar dan mengacu pada rel politik yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi ke arah mana pendidikan akan dibawa dan untuk tujuan apa pendidikan itu dilaksanakan. Dengan kenyataan seperti ini maka manajemen yang dilaksanakan di sebuah satuan pendidikan harus tetap mengacu pada kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengacu pada politik pemerintah dalam bidang pendidikan tadi.

Tentu saja politik pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia berubah seiring perubahan kekuasaan atau orde yang memerintah maupun kebutuhan sosiologis masyarakat pendidikan Indonesia.Oleh karena itu dalam realitasnya tak ada Negara yang tidak ikut campur urusan pendidikan warga negaranya.Oleh karena itu tak jarang dalam dunia pendidikan kemudian timbul konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, masyarakat bertekad untuk mewariskan kepentingan-kepentingannya sendiri pada generasinya, sementara disisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk mendidik rakyatnya sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Pendidikan Islam merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebelum pemerintah kolonial memperkenalkan sekolah. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam tidak serta merta dimasukkan di dalam sistem pendidikan nasional. Organisasi pendidikan Islam memang terus hidup dan berkembang namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dibiarkan hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana.³⁵

Pada sekitar tahun 1946, Departemen Agama telah meletakkan cita-cita pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pendidikan nasional, khususnya pendidikan keagamaan.³⁶ Pada tahun 1970-an baru mulai adanya perhatian pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan kepada madrasah. Kemudian

³⁴ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia Proses, Produk Dan Masa depannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 20

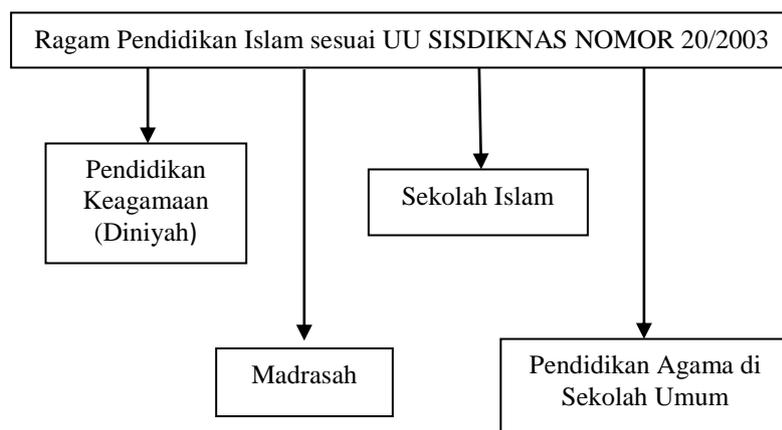
³⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 153-154

³⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, hlm. 154

lahirnya SKB 3 Menteri tahun 1975 antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Pada tahun 1984, SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Sejak saat itu madrasah memasuki mainstream pendidikan nasional.³⁷

Pendidikan islam mendapat pengakuan secara yuridis dengan ciri khasnya baru sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut, pendidikan madrasah diakui sebagai sub sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, dan PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.³⁸ Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. UU tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.³⁹

Pasal 15 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan keagamaan secara beruntun dengan pendidikan umum, pendidikan agama sejajar dengan pendidikan lainnya. Sehingga, peserta didik memiliki status sederajat dengan lulusan pendidikan umum formal.⁴⁰



³⁷ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, hlm. 155

³⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, hlm. 156

³⁹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, hlm. 157

⁴⁰ Departemen Agama RI. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Agama., hlm 7-8

Lingkup pendidikan agama Islam :

- 1) Pendidikan agama di sekolah
- 2) Pendidikan umum berciri Islam, yang terdiri dari: Madrasah dan Sekolah Islam
- 3) Pendidikan keagamaan (diniyah dan pesantren), baik jalur formal, non formal maupun informal.

c. Hubungan manajemen, politik dan pendidikan Islam di Indonesia

Dalam kenyataan hidup organisasi dan atau kelembagaan, tampaknya tidak lepas dari aspek politis. Dalam tataran birokrasi negara, implementasi teori manajemen yang penuh idealitas telah terwarnai oleh kehidupan politis. Hal ini berlaku pula dalam dunia pendidikan. Nata mengemukakan bahwa, sebuah pemerintah Negara dalam berkomunikasi dengan rakyatnya biasanya menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh abdi Negara dan masyarakat sesuai dengan bidangnya termasuk pendidikan.⁴¹

Pemimpin atau pemegang kebijakan yang ada di Negara ini dalam mengambil kebijakan melihat beberapa aspek yang di antaranya; sejarah, sosiologis, budaya, politis dan aspek-aspek lainnya yang lebih luas. Selama ini sekalipun terdapat kementerian tersendiri yang mengurus pendidikan, tetapi beberapa kementerian juga menyelenggarakan pendidikan. Sehingga, pengelolaan pendidikan tidak hanya diurus oleh Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga kementerian lain. Tidak kurang dari 20 % lembaga pendidikan di Tanah Air ini diurus oleh Kementerian Agama. Demikian pula kementerian lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sekalipun tidak sebanyak yang diurus oleh Kementerian Agama, juga menyelenggarakan pendidikan sendiri. Kenyataan itu ada tidak lepas dari persoalan sejarah dan mungkin juga politik.⁴²

Penyelenggaraan pendidikan semakin lebih kompleks sehubungan adanya partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sebagai akibat pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai

⁴¹Abuddin Nata, *Manajemen.*, hlm 10

⁴² Imam Suprayogo. *Kebijakan dan Politik Pendidikan.*Artikel. Diakses 10 Oktober 2017

dengan kebutuhan, maka masyarakat pun menyelenggarakan pendidikan, mulai penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, bahkan PAUD, hingga pendidikan tinggi. Atas dasar kenyataan itu, maka muncul pendidikan yang berstatus negeri dan pendidikan swasta.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara manajemen, politik dan kebijakan pendidikan khususnya pada pendidikan Islam saling terkait antara satu dengan yang lain. Setiap kebijakan mengenai pendidikan pasti ada unsur politik yang mengiringinya. Demikian pula kebijakan yang di ambil oleh pemerintah membutuhkan manajemen yang komprehensif agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

SIMPULAN

Manajemen, politik dan kebijakan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena berhubungan itu dibutuhkan Manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam hal politik pendidikan memiliki fase yang berbeda ketika ada ditangan pemimpin yang berbeda, hal ini menunjukkan dominasi eratnya hubungan politik dalam menentukan kebijakan terutama kebijakan dalam penerapan pendidikan khususnya pendidikan islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-qur'an Al-karim dan terjemah Bahasa Indonesia jus 30. (2006) Semarang: Menara Kudus.
- Departemen Agama RI. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Agama.
- Effendy, Ek. Mochtar. (t.th). *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara.
- Fattah, Nanang. (2004). *Landasan Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet VII.
- Hasan, Ali. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasbullah, (1985). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 153-154
- Imron, Ali. (2002). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Imron, dkk. (2003). *Manajemen Pendidikan Analisis dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Mashutu. *Pendidikan Indoneia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru* dalam Gema Jurnal Pendidikan, Edisi 1 Agustus, 1999.
- Muhadjir, Noeng. (1993). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nata, Abudin. (2007). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet. VII.
- Saliba, Jamil *Mu'jam al-falsafi*. Mesir: dar al-fikr. cet. VII.
- Shadily, John M. Echols. (1980). *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia cet. VIII.
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suprayogo, Imam. *Kebijakan dan Politik Pendidikan*. Artikel. Diakses 10 Oktober 2017